

DINAMIKA KONFLIK VERTIKAL DALAM PENGELOLAAN DESTINASI WISATA: DAMPAK TERHADAP SEKITAR, SOLUSI YANG DITERAPKAN

Adelia Budi Lestari¹, Bambang Suharto²

¹Destinasi Pariwisata, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga

²Manajemen Perhotelan, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga

E-mail: adelia.budi.lestari-2021@vokasi.unair.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan destinasi wisata seringkali terjadi konflik antara pihak-pihak yang terlibat, salah satu contohnya adalah konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang dapat muncul antara individu atau kelompok yang memiliki perbedaan dalam kewenangan, kekuasaan, dan status sosial. Konflik tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan destinasi wisata. Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) penting untuk meminimalisir konflik ini. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis delapan artikel tentang konflik vertikal dalam pengelolaan destinasi wisata. Hasil menemukan bahwa konflik sering muncul dari perbedaan kepentingan dan kebijakan antara pihak-pihak yang terlibat. Resolusi konflik melibatkan negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Pendekatan inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk mengatasi konflik dan memastikan keberlanjutan destinasi wisata.

Kata kunci: Konflik Vertikal, *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

ABSTRACT

Management of tourist destinations often involves conflicts among the parties involved, one example being vertical conflict. Vertical conflict can arise between individuals or groups who have differences in authority, power, and social status. These conflicts have a significant impact on the development of tourist destinations. The principle of Corporate Social Responsibility (CSR) is crucial in minimizing these conflicts. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method to analyze eight articles on vertical conflict in tourism destination management. The findings reveal that conflicts often stem from differences in interests and policies among the involved parties. Conflict resolution involves negotiation, conciliation, mediation, and arbitration. An inclusive and participatory approach in decision-making is necessary to address conflicts and ensure the sustainability of tourist destinations.

Keywords: Vertical conflicts, Corporate Social Responsibility (CSR).

PENDAHULUAN

Destinasi menurut Hadinoto (1996:115) dalam Putri Munggar, P. N. (2014) adalah area tertentu yang dipilih oleh seseorang untuk tinggal atau mengunjungi selama periode waktu tertentu. Istilah destinasi ini dapat mengacu pada area yang direncanakan secara khusus, yang mencakup berbagai fasilitas dan layanan seperti produk wisata, fasilitas rekreasi, hotel, restoran, atraksi wisata, toko ritel, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh pengunjung. Setiawan, I. (2015) berpendapat bahwa dalam pembangunan nasional destinasi wisata

memiliki peran penting dalam meningkatkan sumber penghasilan devisa, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan peluang kerja serta pendapatan masyarakat. Sebagai sektor yang berkontribusi dalam pembangunan, pajak yang diperoleh dari sektor ini telah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan. Selain manfaat ekonomi yang signifikan, destinasi wisata juga dapat memberikan dampak positif pada aspek sosial dan lingkungan. Secara sosial, destinasi wisata seringkali menjadi titik pertemuan antara budaya dan komunitas

yang berbeda, memungkinkan pertukaran budaya dan pemahaman antarindividu. Hal ini dapat menguatkan toleransi, kerja sama lintas budaya, dan meningkatkan kesadaran akan keberagaman. Dari segi lingkungan, destinasi wisata yang dikelola dengan baik dapat menjadi model untuk praktik-praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan limbah, dan pelestarian ekosistem lokal. Dengan demikian, destinasi wisata dapat menjadi kekuatan positif yang memengaruhi baik masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Secara keseluruhan, destinasi wisata memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, untuk memaksimalkan manfaat tersebut sambil melindungi kelestarian alam dan budaya lokal, penting untuk menjalankan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan.

Namun, dalam proses pengelolaan destinasi wisata, seringkali terjadi konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih atau individu dengan kelompok yang memiliki kepentingan, tujuan yang berbeda (Muspawi, M. 2014). Terdapat 2 bentuk konflik yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik vertikal adalah pertentangan yang terjadi antara berbagai komponen masyarakat dalam sebuah struktur yang memiliki hierarki. Sementara itu, konflik horizontal merujuk pada pertentangan yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama dalam suatu konteks (Kusnadi, 2002, hlm.67 dalam Amalia, M., & Malihah, E. 2016). Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik vertikal ini bisa sangat beragam, mulai dari komunitas lokal, pengusaha wisata, pemerintah lokal dan nasional, hingga organisasi lingkungan dan kebudayaan. Misalnya, komunitas lokal mungkin menginginkan perlindungan terhadap lingkungan dan budaya mereka, sementara

pengusaha wisata mungkin lebih fokus pada pengembangan infrastruktur dan keuntungan ekonomi. Konflik vertikal dalam pengelolaan destinasi wisata dapat memiliki dampak yang signifikan pada keberlanjutan destinasi wisata itu sendiri. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menghambat pengembangan destinasi wisata, mengurangi kepuasan pengunjung, merusak citra destinasi, dan bahkan dapat merusak lingkungan alam lokal. Konflik juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pembangunan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) semakin menjadi fokus bagi perusahaan dan lembaga dalam industri pariwisata. CSR mengacu pada tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus diemban oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungannya. Dalam konteks CSR dalam pariwisata, perusahaan atau lembaga yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata memiliki tanggung jawab untuk meminimalisir konflik vertikal dan memastikan keberlanjutan destinasi. Salah satu pendekatan CSR yang dapat diterapkan adalah melalui keterlibatan aktif dengan pihak-pihak terkait dalam destinasi wisata. Misalnya, perusahaan wisata dapat mengadakan dialog terbuka dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Program CSR telah diterapkan pada destinasi wisata sebelumnya, seperti yang dilakukan pada penelitian sebelumnya di Kawasan Wisata Monkey Forest Ubud, Bali oleh Juniari, N. W., & Mahyuni, L. P. (2020). Praktik CSR ini melibatkan dua aspek utama, yaitu bidang sosial, termasuk pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan program beasiswa dan bidang lingkungan, mencakup upaya perluasan hutan, penanaman pohon, penyediaan layanan shuttle, fasilitas sentral

parkir, dan pengelolaan rumah kompos. Penelitian lainya yaitu PT. Pertamina IT Surabaya yang melaksanakan mengembangkan kampung wisata ekoriparian geblak Jambangan yang berhasil meningkatkan perekonomian warga. Pengembangan kampung wisata ini mengadopsi

pendekatan pengembangan masyarakat dengan fokus pada pemberdayaan, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga (Resnawaty, et al., 2024). Program-program pelatihan dan pembangunan berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif pengelolaan destinasi. Melalui CSR, perusahaan atau pihak yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata dapat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan memperhatikan beragam kepentingan ini, CSR dapat membantu mengurangi potensi konflik vertikal yang mungkin timbul karena ketidakpuasan atau ketidakcocokan kepentingan di antara berbagai pihak yang terlibat.

Penting bagi kita untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konflik vertikal dalam pengelolaan destinasi wisata. Dalam hal ini, penting juga untuk melihat perspektif yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Untuk tujuan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan melakukan tinjauan terhadap delapan artikel untuk dianalisis secara mendalam mengenai konflik vertikal, melihat perspektif pihak-pihak yang terlibat pada destinasi wisata, dan menganalisis dampaknya terhadap keberlanjutan. Hal ini akan membantu meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dan mencapai tujuan keberlanjutan destinasi wisata. Selain itu,

dapat mengidentifikasi faktor penyebab konflik dan mencari solusi yang memadai, seperti melalui pendekatan komunikasi yang lebih baik antara berbagai pihak, negosiasi yang konstruktif, atau pembentukan kebijakan yang inklusif. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola konflik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan bagi destinasi wisata. Hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian lewat metode SLR (Systemic Literature System) dengan mengambil contoh kasus- kasus antara dengan masyarakat lokal di destinasi wisata

TINJAUAN PUSTAKA

Konflik Vertikal

Konflik adalah sesuatu yang selalu ada dan terjadi dalam berbagai hubungan sosial di mana pun di dunia kehidupan manusia. Menurut Tualeka (2017) secara etimologis, konflik adalah situasi di mana terjadi pertengkaran, perkelahian, atau perselisihan mengenai pendapat atau keinginan, atau adanya perbedaan dan pertentangan yang berlawanan atau berselisih. Farida, A (2013) menjelaskan bahwa setiap konflik melibatkan dinamika kekuasaan antara berbagai pihak yang terbentuk oleh faktor kekuatan, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Interaksi kekuasaan ini menentukan cara di mana konflik diwujudkan dalam bentuk-bentuk seperti represi militer, dominasi, kekerasan bersama, mogok, atau proses negosiasi yang setara. Konflik dibagi beberapa jenis menurut bentuknya, salah satunya adalah konflik vertikal.

Konflik vertikal adalah bentuk konflik yang timbul antara pemerintah dan masyarakat. Konflik ini dapat menghasilkan perlawanan, ketidaksepakatan, dan bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah (Dema Y., 2018). Maspupah, N. (2018) juga menyebutkan bahwa konflik timbul antara pemerintah dan

sejumlah kelompok sosial dalam masyarakat. Dugaan tersebut adalah bahwa konflik muncul sebagai hasil dari proses pembuatan kebijakan pemerintah yang tidak melibatkan partisipasi, yang kemudian menyebabkan munculnya perbedaan pendapat, pertikaian, kekerasan, dan bahkan separatisme.

Menurut Bagja Waluya (2007: 33), konflik vertikal dapat ditemui dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Setidaknya melibatkan dua pihak, baik perorangan maupun kelompok, yang terlibat dalam interaksi yang saling bertentangan.
2. Terjadi pertentangan antara dua pihak dalam mencapai tujuan mereka, berperan, atau terdapat perbedaan norma dan nilai.
3. Muncul perilaku yang bertujuan untuk meniadakan, mengurangi, atau menekan pihak lain agar bisa mendapatkan keuntungan seperti status, jabatan, materi, kesejahteraan, dan tunjangan tertentu.
4. Terjadi tindakan yang bersifat berhadapan langsung sebagai akibat dari pertentangan yang terus berlanjut.
5. Menyebabkan ketidakadilan karena usaha masing-masing pihak terkait dengan posisi mereka, status sosial, pangkat, kelompok, kekuasaan, harga diri, dan sebagainya.

Resolusi Konflik

Penyelesaian konflik atau resolusi konflik adalah upaya untuk menyelesaikan masalah yang timbul dari konflik dengan mengenali penyebabnya dan berupaya memulihkan hubungan yang damai di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut, Husniyah, R. (2016). Resolusi konflik bertujuan untuk mencapai kesepakatan atau pemahaman bersama yang dapat mengakhiri konflik atau setidaknya mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang

berselisih. Resolusi konflik sendiri dapat dilakukan dengan beberapa upaya.

Menurut Nasikun (1993) dalam Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017), ada beberapa pendekatan dalam penyelesaian konflik:

1. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan berunding untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Ini melibatkan komunikasi dua arah untuk mencapai kesepakatan saat kedua pihak memiliki kepentingan yang sama atau berbeda.
2. Konsiliasi adalah pengendalian konflik melalui lembaga tertentu yang memfasilitasi diskusi dan pengambilan keputusan antara pihak-pihak yang berkonflik.
3. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai penyelesaian kompromistis. Mediator membantu dalam perundingan dan mencari solusi yang diterima oleh semua pihak.
4. Arbitrasi adalah kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan dari pihak ketiga (arbitrer) untuk menyelesaikan konflik. Perbedaannya dengan mediasi adalah pihak-pihak harus menerima keputusan yang diambil oleh arbitrer.

Covey (1992) dalam Dema Y (2018) juga mempunyai tiga strategi untuk menangani konflik vertikal:

1. Pendekatan koersif, yaitu pendekatan yang menekankan pada kekuatan atau kekuasaan dari pihak pemerintah yang menciptakan ketakutan pada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
2. Pendekatan utilitas, pendekatan yang mengedepankan kepentingan, manfaat, atau keuntungan tertentu

yang dapat diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut.

3. Pendekatan yang berpusat pada prinsip - mengacu pada nilai-nilai kepercayaan, penghargaan, dan pengakuan terhadap hak-hak, tanggung jawab, dan budaya dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti pada penelitian kali ini yaitu Systematic Literature Review (SLR). Metode SLR ini melibatkan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan interpretasi terhadap semua temuan penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh peneliti (Soebiartika, et al., 2023). Peneliti menggunakan delapan artikel yang terkait dengan konflik vertikal pada proses pengelolaan suatu destinasi pariwisata yang dilihat dari perspektif pihak terlibat dan dampaknya pada keberlanjutan

serta bagaimana solusi untuk konflik tersebut.

Artikel-artikel ini diperoleh dari jurnal nasional dan internasional melalui Google Scholar, dengan total delapan artikel yang direview dalam rentang tahun 2010 hingga 2023. Setelah artikel-artikel ini dikumpulkan, mereka kemudian dianalisis dan diorganisir dalam sebuah tabel yang mencakup informasi seperti nama peneliti, tahun publikasi, metode dan temuan dari penelitian tersebut. Isi dari tulisan ini mencakup tinjauan dan perbandingan atas artikel-artikel yang telah direview, yang kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian literatur ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis konflik vertikal yang terjadi pada proses pengelolaan destinasi wisata. Sejauh mana konflik tersebut memberikan dampak kepada destinasi wisata, masyarakat ataupun kepada lingkungan, serta bagaimana pihak-pihak

yang terlibat menerapkan solusi untuk menangani konflik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Destinasi wisata sering menjadi sumber konflik yang kompleks, terutama ketika berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda terlibat dalam pengelolaannya. Konflik vertikal, yang terjadi antara pemerintah, pengusaha, komunitas lokal, dan organisasi lingkungan, merupakan salah satu bentuk konflik yang sering muncul dalam konteks ini. Konflik ini juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar, masyarakat lokal, dan keberlanjutan destinasi wisata itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai solusi konflik yang tepat demi meredam konflik tersebut agar tidak semakin menyebar dan menyebabkan dampak yang lebih meluas lagi (Irwandi, I., & Chotim, E. R. 2017). Berdasarkan dari delapan sumber artikel jurnal yang telah ditetapkan memenuhi kriteria inklusi maka adapun keterangan hasil penelitiannya sebagai berikut:

1. Beta Pramutia Nazyul, Syamsir, et al., (2023), Konflik Vertikal Antara Pedagang Kaki Lima Taplau Dengan Pemerintah Kota Padang, Hasil studi menunjukkan bahwa pada 2019, sebagian PKL di Kota Padang belum memiliki tempat tetap walaupun ada 126 toko yang tersedia. Namun, pada 2020, PKL yang tidak mengikuti LPC dikeluarkan dan tidak diizinkan berjualan lagi karena keterbatasan anggaran Pemko Padang. pemerintah Kota Padang bersedia memberikan dukungan kepada PKL agar mereka dapat melanjutkan usaha jualan mereka dengan menyediakan lokasi yang sesuai, sehingga kegiatan wisata tidak terganggu.
2. Vivin Maulana (2022), Dinamika Konflik Pada Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam Menjadi Wisata

Alam Di Pulau Sempu, Kabupaten Malang, Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik terhadap situasi tersebut dilakukan dengan melakukan evaluasi ulang terhadap status lokasi oleh pihak LIPI, untuk menilai apakah memang lokasi tersebut layak dijadikan destinasi wisata alam. Setelah evaluasi ulang, diputuskan Pulau Sempu akan ditetapkan sebagai Cagar Alam. Akibat dari keputusan ini, masyarakat sekitar merasa kehilangan pekerjaan mereka dan kembali ke profesi asal mereka sebagai petani atau nelayan.

3. Kurniati, N., Lubis, D. P., & Kinseng, R. A. (2021), Manajemen Konflik Alam Pengembangan Wisata Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Hasil menunjukkan adanya dua kejadian konflik, konflik pertama antara BUMDes dan penduduk dari desa tetangga (Desa Pamijahan), sedangkan konflik kedua melibatkan pengelola inti pariwisata desa Curug Cikuluwung dengan pemerintah Desa Cibitung Wetan. Konflik pertama telah diselesaikan, namun konflik kedua belum menemukan solusi. Oleh karena itu, diperlukan mediasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap pariwisata desa untuk memfasilitasi atau mediasi antara pihak-pihak yang terlibat
4. konflik, seperti Pemerintahan Kecamatan Pamijahan, Dinas Pariwisata Kabupaten Bogor, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, atau PT Indonesia Power.
5. Gunggung Senoaji, et al., (2020), Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial Dalam Kawasan Hutan Konservasi

Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai Di Kota Bengkulu, Metode yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan 12 orang di kawasan hutan konservasi TWA Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu, Penelitian menunjukkan kawasan taman wisata alam ini belum resmi ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga harus ditetapkan guna memastikan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Terdapat konflik tenurial dimana untuk meresolusi konflik tersebut, disarankan melakukan perubahan sebagian peruntukan kawasan hutan melalui revisi skema RTRW Provinsi Bengkulu dan melakukan kolaborasi dalam pemanfaatan kawasan hutan taman wisata dengan pengelola.

6. Afala, L. M. (2017). Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul, Konflik yang terjadi di Goa Pindul dipicu oleh dinamika politik yang kontroversial, terutama terkait dengan pengelolaan dan kepemilikan area tersebut antara pemerintah, Pokdarwis, dan masyarakat lokal. Konflik ini kemudian semakin kompleks karena adanya struktur ekonomi yang terbuka dan persaingan hak kepemilikan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan objek wisata bukan hanya masalah teknis, tetapi juga melibatkan aspek politik dan ekonomi yang mempengaruhi dinamika konflik serta pengembangan pariwisata di area tersebut.
7. Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017), Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta (Studi Kasus Di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitong), Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan informan :

Ketua BPD, Kepala dan Sekretaris Desa, 2 nelayan, 1 perwakilan perusahaan tambang, dua tokoh masyarakat lainnya, Hasil menunjukkan konflik yang terjadi di Hamlet Samak River dipicu oleh kurangnya sosialisasi, kurangnya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat, serta perbedaan dalam pentingnya dampak aktivitas pertambangan. Tindakan penyelesaian konflik yang diambil meliputi negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Negosiasi adalah pencarian kesepakatan antara pihak-pihak terlibat. Konsiliasi adalah pendekatan pemerintah desa yang melibatkan masyarakat. Mediasi dilakukan oleh pihak netral. Arbitrase menggunakan keputusan pihak berwenang untuk menyelesaikan konflik.

8. Jonyanis, J., & Jalil, A. (2015), Konflik Sosial Dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus Di Desa Muara Takus Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar, Metode digunakan Kualitatif, Penelitian menunjukkan bahwa konflik vertikal dan horizontal dalam pengembangan candi Muara Takus disebabkan oleh isu kompensasi tanah yang masih mengambang dan disebabkan oleh kepemilikan tanah yang tidak jelas yang berdampak pada rencana pembangunan candi kedepannya
9. Sembiring, E., Basuni, S., & Soekmadi, R. (2010), Resolusi Konflik Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Di Kabupaten Teluk Wondama, Teknik pengambilan menggunakan purposive sampling dan teknik snow ball sampling. Selain itu juga dilakukan wawancara dan observasi, Hasil penelitian menunjukkan konsep penyelesaian konflik dalam menggunakan

pendekatan manajemen kolaboratif yang dikembangkan disebut "kontrol bersama," dimulai dengan proses negosiasi dan pengembangan kesepakatan, kemudian berlanjut ke pembagian kekuasaan dan tanggung jawab secara resmi.

Hasil penelitian dari delapan artikel menunjukkan bahwa dinamika konflik vertikal dalam pengelolaan destinasi wisata memiliki dampak yang signifikan. Artikel-artikel tersebut mengungkapkan bahwa konflik vertikal dalam pengelolaan destinasi wisata merupakan masalah yang kompleks. Konflik yang terjadi melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, seperti pemerintah, pengusaha pariwisata, komunitas lokal, dan organisasi lingkungan. Beberapa konflik dipicu oleh perbedaan kepentingan, kebijakan, kepemilikan, dan persepsi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta terkait dampak pengembangan pariwisata.

Pemerintah seringkali memiliki kepentingan untuk mengembangkan industri pariwisata guna meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, masyarakat lokal mungkin memiliki kepentingan dalam pelestarian lingkungan, mempertahankan hak-hak mereka terhadap tanah, dan menghindari perubahan sosial ekonomi yang tidak diinginkan. Selain itu, sektor swasta terlibat dalam konflik karena kepentingan ekonomi yang mereka miliki dalam pengembangan proyek pariwisata.

Selain perbedaan kepentingan, konflik juga sering muncul karena perbedaan kebijakan. Pemerintah memiliki regulasi dan kebijakan terkait dengan pengembangan pariwisata yang mungkin bertentangan dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat lokal. Misalnya, kebijakan penataan ruang yang memperbolehkan pembangunan infrastruktur pariwisata di area yang dianggap penting bagi masyarakat lokal untuk mata pencaharian mereka.

Kepemilikan juga menjadi sumber konflik. Tanah atau sumber daya alam yang digunakan untuk pengembangan pariwisata seringkali memiliki status kepemilikan yang kompleks. Konflik terkait kepemilikan bisa timbul antara masyarakat lokal yang mengklaim hak atas tanah mereka dengan pemerintah atau pengembang swasta yang ingin memanfaatkannya untuk proyek pariwisata.

Persepsi yang berbeda-beda terhadap dampak pengembangan pariwisata juga memicu konflik. Masyarakat lokal memiliki pandangan yang berbeda tentang manfaat dan kerugian dari industri pariwisata. Mereka mungkin khawatir tentang dampak lingkungan, sosial, dan budaya yang dapat terjadi akibat peningkatan aktivitas pariwisata. Di sisi lain, pemerintah dan sektor swasta mungkin melihat manfaat ekonomi yang besar dari pengembangan pariwisata tersebut.

Dalam menyelesaikan konflik tersebut, artikel-artikel penelitian menyoroti beberapa metode seperti negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Namun, penting untuk diingat bahwa beberapa konflik belum terselesaikan sepenuhnya karena ada situasi di mana keputusan yang diambil untuk menyelesaikan konflik bisa merugikan satu pihak namun menguntungkan yang lain. Untuk mengatasi konflik dalam pengembangan pariwisata secara efektif, diperlukan pendekatan inklusif dan partisipatif. Melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta, adalah kunci untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Kolaborasi yang berkelanjutan dan dialog terbuka juga penting untuk membangun pemahaman bersama dan mengurangi ketegangan dalam pengelolaan destinasi wisata.

Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) sangat penting untuk meminimalisir

konflik ini. CSR mendorong perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, yang sejalan dengan kebutuhan untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan adil. Dengan mengintegrasikan CSR ke dalam operasi mereka, bisnis pariwisata dapat membantu menjembatani kesenjangan antara berbagai kepentingan para pemangku kepentingan, memastikan bahwa pengembangan pariwisata memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat sambil mengurangi potensi konflik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik vertikal dalam pengelolaan destinasi wisata adalah masalah kompleks yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, kebijakan, kepemilikan, dan persepsi antara pemerintah, pengusaha pariwisata, komunitas lokal, dan organisasi lingkungan. Pemerintah fokus pada peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan masyarakat lokal lebih peduli pada pelestarian lingkungan dan hak atas tanah mereka. Penyelesaian konflik melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase seringkali masih merugikan salah satu pihak. Pendekatan inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan serta penerapan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afala, L. M. (2017). Menalar dinamika konflik wisata Goa Pindul. *Journal of Governance*, 2(1)
- Amalia, M., & Malihah, E. (2016). Konflik pembebasan lahan pembangunan bendungan jatigede di desa wado. *Sosietas: jurnal pendidikan sosiologi*, 6(2).

- Dassir, M. (2008). Resolusi konflik pemanfaatan lahan masyarakat dalam kawasan hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan masyarakat*, 3(1), 8205.
- Dema, Y. (2018). Komunikasi Mosaboa Lakiola dalam Penyelesaian Konflik dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dentana, Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, Flores. *Jurnal Komunikasi dan Bisnis*, 6(2).
- Farida, A. (2013). Jalan panjang penyelesaian konflik kasus lumpur Lapindo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17(2), 144-162.
- Husniyah, R. (2016). Solusi Pemerintah Daerah Terhadap Konflik Sosial Di Desa Taman Asri Kecamatan Purbolinggo Dan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur.
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42.
- Jonyanis, J., & Jalil, A. (2015). Konflik Sosial dalam Pengembangan Objek Wisata Candi Muara Takus di Desa Muara Takus Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar (Doctoral dissertation, Riau University).
- Juniari, N. W., & Mahyuni, L. P. (2020). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mewujudkan Pariwisata berbasis masyarakat berkelanjutan. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 21-28.
- Kurniati, N., Lubis, D. P., & Kinseng, R. A. (2021). Manajemen Konflik dalam Pengembangan Wisata Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3).
- Maulana, V. (2022). Dinamika Konflik pada Perubahan Fungsi Kawasan Cagar Alam Menjadi Wisata Alam di Pulau Sempu, Kabupaten Malang. *Journal of Politics and Policy*, 4(1), 51-64.
- Maspupah, N. (2018). Analisis Konflik Vertikal Antara Masyarakat Kampung Dadap Dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Muspawi, M. (2014). Manajemen konflik (upaya penyelesaian konflik dalam organisasi) (Vol. 16). Jambi University.
- Nazyul, B. P., Syamsir, S., Natasya, C. A., Hafiszah, L., Putri, N. L., & Angelina, T. (2023). KONFLIK VERTIKAL ANTARA PEDAGANG KAKI LIMA TAPLAU DENGAN PEMERINTAH KOTA PADANG. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(4), 412
- PUTRI MUNGGAR, P. N. (2014). EVALUASI ATRIBUT WISATA TERHADAP KEPUASAN, KEPERCAYAAN DAN DESTINATION LOYALTY (Studi pada Candi Prambanan) (Doctoral dissertation, UAJY).
- Resnawaty, R., Rivani, R., & Nulhakim, S. A. (2024). ANALISIS PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA GEBLAK JAMBANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI CSR PT PERTAMINA (PERSERO) IT SURABAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 69-79.
- Sembiring, E., Basuni, S., & Soekmadi, R. (2010). Resolusi konflik pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Kabupaten Teluk Wondama. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 16(2), 84-91.
- Senoaji, G., Anwar, G., & Hidayat, M. F. Iskandar.(2020). Tipologi dan Alternatif Resolusi Konflik Tenurial dalam Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2), 323-332.
- Setiawan, I. (2015). Potensi destinasi wisata di Indonesia menuju kemandirian ekonomi.
- Soebiartika, R., & Rindaningsih, I. (2023). Systematic Literature Review (SLR):

JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK	VOLUME 6	NOMOR 2	HALAMAN 224 – 233	ISSN 2655-8823 (p) ISSN 2656-1786 (e)
---------------------------------------	----------	---------	-------------------	--

Implementasi Sistem Kompensasi dan Penghargaan Terhadap Kinerja Guru SD Muhammadiyah Sidoarjo. MAMEN: Jurnal Manajemen, 2(1), 171-185.

Tualeka, M. W. N. (2017). Teori konflik sosiologi klasik dan modern. Al-Hikmah: Jurnal studi Agama-agama, 3(1), 3248.
Waluya, B. (2007). Sosiologi: Menyelami fenomena sosial di masyarakat. PT Grafindo Media Pratama.